

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, dkk, 2004,*Kejahatan Terorisme dalam Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, PT Refika Aditama : Bandung.
- Adami Chazawi, 2002,*Pelajaran Hukum Pidana, Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grahisindo Persada: Bandung.
- Adami Chazawi, 2002,*Pelajaran Hukum Pidana, Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grahisindo Persada: Bandung.
- Adami Chazawi, 2002,*Pelajaran Hukum Pidana, Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grahisindo Persada: Bandung.
- Adami Chazawi, 2002,*Pelajaran Hukum Pidana, Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grahisindo Persada: Bandung.
- Ali Mubarak, 2004,*Kejahatan Terorisme dalam Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, PT Refika Aditama: Bandung.
- Azyumardi Azra, 2004, *Kejahatan Terorisme dalam Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, PT Refika Aditama: Bandung.
- Bala Reddy, 2003, *Singapore's Legislation Against Terrorism*, Imparsial: Surabaya.
- Bala Reddy, 2003,*Singapore's Legislation Against Terrorism*, Imparsial: Surabaya.
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, 1992,*Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni: Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Alumni: Bandung.
- Darji Darmo Diharjo dan Sidharta, 2006,*Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia dan Pustaka Utama: Jakarta.
- E. V. Walter, 2002,*Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI: Jakarta.

- F. Budi Hardiman, 2003, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial: Surabaya.
- James Adams, 2002, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI: Jakarta.
- Lamintang, 1994, *Delik-Delik Pidana Di luar KUHP Politik*, Alumni: Bogor.
- Lili Rasyidi dan Ira Tania Rasyidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandar Maju: Bandung.
- Miriam Budiarjo, 1995, *Negara Hukum Indonesia; Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Prenada Media: Jakarta.
- Muchamad Ali Syafaat, 2003, *Dalam Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial: Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2003, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung.
- Muladi, 2002, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum*, Habibie Center: Jakarta.
- Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*, Habibie Center: Jakarta.
- Nasir Abas 2006, *Membongkar Jamaah Islamiyah, Pengakuan Mantan Anggota Jamaah Islamiyah*, Grafindo Ghazanah Ilmu: Jakarta.
- OC. Kaligis, 2003, *Terorisme Tragedi Umat Manusia*, OC.Kaligis & Associates: Jakarta.
- Philips Jusario Vermonte, 1998, *American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, Tata Nusa: Jakarta.
- Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks ke Indonesiaan*, CV Utomo: Bandung.
- Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama: Bandung.

- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru: Bandung.
- Syaikh Abdul Aziz ar-Rajhi, 2006, *Fatwa-Fatwa Terlengkap Seputar Terorisme, Jihad dan Mengkafirkan Muslim*, Darul Haq: Jakarta.
- Syaikh Abdul Muhsin Alu Ubaikan, 2006, *Fatwa-Fatwa Terlengkap Seputar Terorisme, Jihad dan Mengkafirkan Muslim*, Darul Haq: Jakarta.
- Syaikh al-Albani, 2006, *Fatwa-Fatwa Terlengkap Seputar Terorisme, Jihad dan Mengkafirkan Muslim*, Darul Haq: Jakarta.
- Syaikh Shalih Al-Fauzan, 2006, *Fatwa-Fatwa Terlengkap Seputar Terorisme, Jihad dan Mengkafirkan Muslim*, Darul Haq: Jakarta.
- Tim Penyusun, 1995, *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdiknas dan Balai Pustaka: Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan Perppu Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.